

Regional Financial Independence in Indonesia: The Role of Revenue Effectiveness, Fiscal Decentralization, and ICT

Syafrul Antoni

Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Jambi, Indonesia

Syafrulantoni11@gmail.com

Diserahkan tanggal 03 September 2025 | Diterima tanggal 25 Desember 2025 | Diterbitkan tanggal 31 Desember 2025

Abstract:

This study aims to analyze the effects of regional revenue effectiveness, local tax revenue effectiveness, and the degree of fiscal decentralization on regional financial independence, as well as to examine the role of Information and Communication Technology (ICT) as a moderating variable. This study employs a quantitative approach using secondary data from 38 provinces in Indonesia in 2024. The sampling technique used is saturated sampling, in which all 33 provinces are included as research samples. Data analysis was conducted using EVIEWS through panel data regression and Moderated Regression Analysis (MRA). The results show that regional revenue effectiveness has no significant effect on regional financial independence, while the degree of fiscal decentralization has a positive and significant effect. Local tax revenue effectiveness also has no significant effect on regional financial independence. Furthermore, ICT significantly moderates the effect of regional revenue effectiveness on regional financial independence by weakening the relationship, but does not significantly moderate the effect of local tax revenue effectiveness. In contrast, ICT strengthens the effect of fiscal decentralization on regional financial independence. These findings indicate that ICT is more effective in supporting regional fiscal independence when accompanied by stronger own-source revenue capacity and fiscal decentralization.

Keywords: Regional Financial Independence, Regional Revenue Effectiveness, Local Tax Revenue, Fiscal Decentralization, Information and Communication Technology.

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas pendapatan daerah, efektivitas pendapatan pajak daerah, dan derajat desentralisasi fiskal terhadap kemandirian keuangan daerah, serta menguji peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari 38 provinsi di Indonesia pada tahun 2024. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh, sehingga seluruh 38 provinsi dijadikan sebagai sampel penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan EVIEWS melalui regresi data panel dan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pendapatan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Efektivitas pendapatan pajak daerah juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Selanjutnya, TIK secara signifikan memoderasi pengaruh efektivitas pendapatan daerah terhadap kemandirian keuangan daerah dengan memperlemah hubungan tersebut, tetapi tidak secara signifikan memoderasi pengaruh efektivitas pendapatan pajak daerah. Sebaliknya, TIK memperkuat pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap kemandirian keuangan daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa TIK lebih efektif dalam mendukung kemandirian fiskal daerah apabila disertai dengan kapasitas pendapatan asli daerah dan desentralisasi fiskal yang lebih kuat.

Kata Kunci: Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas Pendapatan Daerah, Pendapatan Pajak Daerah, Desentralisasi Fiskal, Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan keuangan publik sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan masyarakat setempat. Desentralisasi tidak hanya ditujukan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah agar mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara lebih mandiri dan akuntabel. Oleh karena itu, keberhasilan desentralisasi fiskal tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran yang dikelola, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui sumber pendapatan yang berada dalam kendali daerah. Namun, setelah lebih dari dua dekade implementasi otonomi daerah, ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih menjadi persoalan struktural. Syafri et al. (2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah pusat sehingga kemandirian keuangan daerah masih menghadapi keterbatasan.

Permasalahan tersebut tercermin dalam struktur pendapatan pemerintah daerah. Data Portal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pada 2024 pendapatan transfer pemerintah pusat mencapai Rp899,20 triliun, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar Rp383,26 triliun (Kementerian Keuangan, 2024). Dominasi transfer tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas anggaran daerah belum otomatis mencerminkan peningkatan kemandirian fiskal. Ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dapat membatasi ruang fiskal yang secara langsung berada dalam kendali pemerintah daerah dan mengurangi fleksibilitas dalam menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan lokal. Persoalan tersebut juga menunjukkan adanya disparitas kapasitas fiskal antarwilayah, sehingga kemandirian keuangan tidak hanya menjadi persoalan besarnya pendapatan, tetapi juga kemampuan pemerintah daerah mengoptimalkan sumber pendapatan sendiri.

Dalam perspektif Fiscal Federalism Theory, desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyesuaikan pelayanan publik dengan kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan akuntabilitas fiskal. Namun, efektivitas desentralisasi bergantung pada kapasitas pendapatan daerah. Keterbatasan sumber pendapatan sendiri dapat meningkatkan ketergantungan terhadap transfer pusat, sehingga kemandirian keuangan daerah menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan daerah membiayai pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Syafri et al. (2024) menempatkan kemandirian keuangan sebagai persoalan penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Temuan Ferdiansyah dan Febrianti (2025) serta Hasanah et al. (2025) menunjukkan bahwa optimalisasi pajak daerah dan PAD berperan dalam memperkuat kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat. Dengan demikian, peningkatan kemandirian tidak hanya bergantung pada besaran PAD, tetapi juga efektivitas pengelolaannya.

Salah satu faktor yang secara konseptual berkaitan dengan kemandirian keuangan adalah efektivitas pendapatan daerah. Efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, efektivitas tidak hanya menunjukkan keberhasilan mencapai target anggaran, tetapi juga mencerminkan kemampuan pemerintah mengidentifikasi potensi pendapatan, mengoptimalkan mekanisme pemungutan, dan mengelola sumber pendapatan secara konsisten. Semakin tinggi efektivitas pendapatan, semakin besar kemampuan daerah menghasilkan penerimaan aktual yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan publik. Dengan demikian, efektivitas pendapatan berpotensi memperkuat kapasitas fiskal, mengurangi ketergantungan terhadap transfer, dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berperan penting dalam memperkuat

kemandirian fiskal pemerintah daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer (Fariyanda et al., 2025; Masdar et al., 2025). Siswanto dan Maylani (2022) menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD merupakan salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kinerja dan kapasitas fiskal pemerintah daerah sedangkan Hasil penelitian Riza dan Zuripal (2023) menemukan bahwa efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. .

Namun, efektivitas pendapatan secara agregat belum sepenuhnya menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan seluruh sumber PAD. Efektivitas penerimaan pajak menjadi penting karena pajak daerah merupakan instrumen utama dalam memperkuat kapasitas fiskal berbasis potensi ekonomi wilayah. Semakin tinggi kemampuan daerah merealisasikan target penerimaan pajak, semakin besar peluang peningkatan PAD dan kemandirian fiskal. Alazhari dan Hendaris (2025) menemukan bahwa tax effort berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan Ferdiansyah dan Febrianti (2025) menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa optimalisasi penerimaan pajak merupakan mekanisme penting untuk memperluas ruang fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Sebaliknya, Oktavia (2021) menemukan bahwa tax effort tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Selain efektivitas pendapatan dan pajak, derajat desentralisasi fiskal merupakan dimensi penting dalam menjelaskan kemandirian keuangan daerah. Derajat desentralisasi fiskal menunjukkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dan menggambarkan sejauh mana pembiayaan pemerintahan bersumber dari kapasitas pendapatan sendiri. Semakin besar proporsi PAD, semakin luas ruang fiskal yang berada dalam kendali pemerintah daerah; sebaliknya, rendahnya kontribusi PAD menunjukkan bahwa pembiayaan daerah masih ditopang sumber eksternal, terutama transfer pusat. Oleh sebab itu, secara konseptual peningkatan derajat desentralisasi fiskal dapat memperkuat kemandirian keuangan daerah. Siswanto dan Maylani (2022) menempatkan derajat desentralisasi fiskal sebagai indikator penting dalam mengevaluasi kapasitas dan kinerja keuangan daerah. Penelitian Sirait et al. (2026) juga menunjukkan pentingnya kontribusi PAD, efektivitas PAD, dan derajat desentralisasi dalam menjelaskan kondisi fiskal daerah. Namun, Yuvanda et al. (2025) menemukan bahwa derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa tingginya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah belum tentu secara otomatis menghasilkan peningkatan kinerja daerah.

Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, integrasi data, dan kualitas informasi keuangan. Secara teoritis, peran TIK didukung oleh Technology Organization Environment (TOE) Framework yang menyatakan bahwa keberhasilan teknologi dipengaruhi aspek teknologi, organisasi, dan lingkungan (Tornatzky & Fleischer, 1990), serta DeLone dan McLean Information Systems Success Model yang menekankan pentingnya kualitas sistem dan informasi dalam menghasilkan manfaat organisasi (DeLone & McLean, 2003). Dalam pemerintah daerah, Diaha et al. (2026) menunjukkan bahwa kapabilitas TIK meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi dan pelaporan keuangan, sedangkan Biyantoro (2023) menemukan bahwa TIK tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa manfaat TIK bergantung pada kompetensi SDM, kualitas sistem, dan kapasitas organisasi. Dengan demikian, TIK secara teoritis dapat memperkuat pengaruh efektivitas pendapatan, pajak daerah, dan derajat desentralisasi fiskal terhadap kemandirian keuangan melalui optimalisasi potensi pendapatan, integrasi data, efisiensi pemungutan, serta peningkatan pengawasan dan kualitas informasi keuangan.

Meskipun penelitian mengenai kemandirian keuangan daerah terus berkembang, masih terdapat beberapa research gap. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada PAD, pajak daerah,

transfer, belanja, ukuran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi sebagai determinan kemandirian (Syafri et al., 2024). Namun, kajian yang secara khusus menguji efektivitas pendapatan daerah, efektivitas penerimaan pajak, dan derajat desentralisasi fiskal pada tingkat pemerintah provinsi masih terbatas. Selain itu, penelitian yang mengintegrasikan TIK sebagai variabel moderasi untuk menjelaskan apakah kapasitas digital memperkuat atau memperlemah hubungan faktor-faktor fiskal tersebut dengan kemandirian keuangan daerah juga masih relatif sedikit. Kondisi ini menunjukkan adanya empirical, contextual, methodological, dan moderation gap yang perlu diisi melalui penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, novelty penelitian ini terletak pada integrasi dimensi kinerja pendapatan dan transformasi digital dalam satu model kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh efektivitas pendapatan daerah, efektivitas penerimaan pajak, dan derajat desentralisasi fiskal terhadap kemandirian keuangan daerah, tetapi juga menguji apakah TIK memperkuat atau memperlemah masing-masing hubungan tersebut. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih kontekstual karena kemampuan daerah mencapai kemandirian fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan yang berhasil dihimpun, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dan teknologi yang digunakan untuk mengelolanya. Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian Fiscal Federalism Theory dengan memasukkan kapasitas digital sebagai faktor kontingensi dalam hubungan fiskal daerah. Secara empiris, penelitian ini bertujuan untuk menguji mengenai keterkaitan antara efektivitas pendapatan daerah, efektivitas penerimaan pajak, dan Derajat desentralisasi fiskal terhadap kemandirian keuangan pada pemerintah provinsi di Indonesia dimoderasi oleh teknologi informasi dan komunikasi. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk merumuskan strategi peningkatan PAD dan penerimaan pajak yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian target nominal, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan teknologi digital..

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif memandang objek penelitian berdasarkan hubungan sebab-akibat yang melibatkan variabel independen dan variabel dependen. Pendekatan ini menggunakan data dalam bentuk angka serta menekankan pada analisis statistik dan numerik (Sugiyono, 2019). Populasi didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh 38 provinsi di Indonesia pada tahun 2024. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria tersebut meliputi ketersediaan, kelengkapan, dan konsistensi data yang diperlukan untuk mengukur seluruh variabel penelitian. Beberapa provinsi tidak dapat dijadikan sampel karena laporan atau data keuangan yang dibutuhkan belum tersedia secara lengkap. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 33 provinsi yang memenuhi persyaratan dan digunakan sebagai sampel penelitian.

Menurut Sugiyono (2019), variabel penelitian merupakan atribut, karakteristik, atau nilai yang melekat pada individu, objek, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta ditarik kesimpulannya. Variabel Operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagaimana tabel 1 berikut:

Table 1. Definisi Operasional Variabel**Tabel Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi Operasional	Indikator/Rumus Pengukuran	Skala	Sumber Data
Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dengan mengandalkan pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri serta mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat (Mahmudi, 2019).	$KKD = (PAD / \text{Pendapatan Transfer}) \times 100\%$	Rasio	Laporan Realisasi Anggaran (LRA), DJPK Kementerian Keuangan
Efektivitas Pendapatan Daerah (X ₁)	Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD (Mahmudi, 2019).	$EPD = (\text{Realisasi Pendapatan Daerah} / \text{Target Pendapatan Daerah}) \times 100\%$	Rasio	Laporan Realisasi Anggaran (LRA), DJPK Kementerian Keuangan
Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah (X ₂)	Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin baik kemampuan pencapaian target penerimaan pajak daerah (Halim & Kusufi, 2014).	$EPPD = (\text{Realisasi Pajak Daerah} / \text{Target Pajak Daerah}) \times 100\%$	Rasio	Laporan Realisasi Anggaran (LRA), DJPK Kementerian Keuangan
Derajat Desentralisasi Fiskal (X ₃)	Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri. Rasio ini menunjukkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah (Mahmudi, 2019).	$DDF = (PAD / \text{Total Pendapatan Daerah}) \times 100\%$	Rasio	Laporan Realisasi Anggaran (LRA), DJPK Kementerian Keuangan

Teknologi Informasi dan Komunikasi (M)	Tingkat perkembangan TIK suatu wilayah yang mencerminkan tiga dimensi utama, yaitu akses dan infrastruktur, penggunaan TIK, serta keahlian TIK (BPS, 2025).	IP-TIK = (Akses dan Infrastruktur, Penggunaan, Keahlian)	Rasio	Badan Pusat Statistik (BPS)
--	---	--	-------	-----------------------------

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan EViews dengan pendekatan regresi cross-section, karena data yang digunakan mencakup 33 provinsi di Indonesia pada satu periode pengamatan, yaitu tahun 2024. Analisis cross-section digunakan untuk menguji hubungan antarvariabel pada beberapa unit analisis dalam satu periode waktu (Wooldridge, 2020). Tahapan analisis meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik meliputi uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan normalitas untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi yang diperlukan. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2) pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) (Wooldridge, 2020).

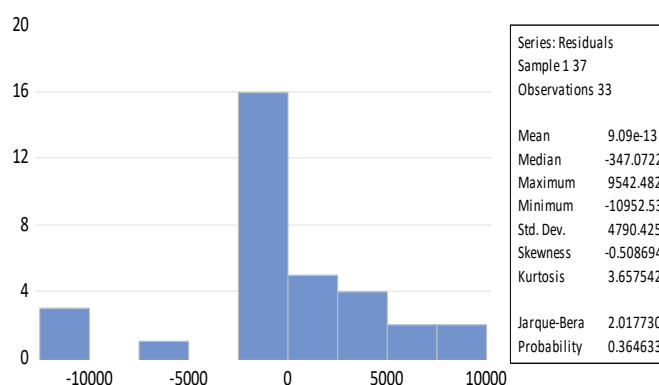
Penelitian ini menggunakan variabel moderasi, pengujian dilakukan melalui Moderated Regression Analysis (MRA) dengan memasukkan variabel interaksi antara variabel independen dan variabel moderasi. Koefisien interaksi digunakan untuk menentukan apakah variabel moderasi memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen (Hayes, 2018). Seluruh proses pengolahan data dan estimasi model regresi dilakukan menggunakan EViews.

PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan menggunakan Jarque-Bera (JB) dengan melihat nilai probabilitas (*Probability*). Uji Jarque-Bera didasarkan pada nilai *skewness* dan *kurtosis* residual, dengan hipotesis nol (H_0) bahwa residual berdistribusi normal (Gujarati & Porter, 2009). Pengambilan keputusan menggunakan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 (Prob. > 0,05), maka H_0 tidak ditolak sehingga residual dinyatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas lebih kecil atau sama dengan 0,05 (Prob. $\leq 0,05$), maka H_0 ditolak sehingga residual dinyatakan tidak berdistribusi normal.

Grafik 1. Uji Normalitas



Berdasarkan hasil uji normalitas pada 33 observasi pada grafik 1 diatas, nilai Jarque-Bera sebesar 2,017730 dengan Probability sebesar 0,364633. Karena nilai probabilitas $0,364633 > 0,05$, maka residual berdistribusi normal. Nilai skewness sebesar -0,508694 menunjukkan kemencengan negatif yang relatif rendah, sedangkan nilai kurtosis sebesar 3,657542 menunjukkan distribusi yang relatif mendekati distribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas residual terpenuhi, sehingga model regresi layak digunakan untuk pengujian hipotesis lebih lanjut.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan mengetahui adanya hubungan linear yang kuat antarvariabel independen dalam model regresi (Gujarati & Porter, 2009). Pengujian dilakukan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai Centered VIF < 10 , maka tidak terdapat gejala multikolinearitas, sedangkan nilai VIF ≥ 10 menunjukkan adanya indikasi multikolinearitas (Wooldridge, 2019).

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	31.505404	41,05811	NA
X1	0,244671	37,31594	1,307643
X2	0,062826	8,722159	1,238598
X3	0,228372	6,281324	1,062529

Sumber : Data diolah peneliti, 2026

Hasil uji multikolinearitas pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *Centered Variance Inflation Factor* (VIF) untuk variabel X1 sebesar 1,307643, X2 sebesar 1,238598, dan X3 sebesar 1,062529. Seluruh nilai VIF tersebut berada di bawah batas 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antarvariabel independen dalam model penelitian. Dengan demikian, masing-masing variabel independen memiliki korelasi yang tidak berlebihan satu sama lain dan dapat digunakan secara simultan dalam model regresi tanpa menimbulkan masalah multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residual pada setiap pengamatan dalam model regresi (Gujarati & Porter, 2009). Pengujian dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Apabila nilai Prob. $> 0,05$, maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila Prob. $\leq 0,05$, maka terdapat indikasi heteroskedastisitas (Wooldridge, 2019).

Tabel 3
Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.432,616	3.829,659	0,374084	0,7111
X1	0,082471	0,337488	0,244368	0,8087
X2	-0,14522	0,171017	-0,852753	0,4147
X3	0,549169	0,326054	1,684289	0,1029

Sumber : Data diolah peneliti, 2026

Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 3 menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel X1 sebesar 0,8087, X2 sebesar 0,4147, dan X3 sebesar 0,1029. Seluruh nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0,05). Dengan demikian, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap nilai absolut residual. Hasil tersebut menunjukkan bahwa varians residual relatif konstan atau tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Oleh karena itu, asumsi

homoskedastisitas dalam model regresi telah terpenuhi dan model layak digunakan untuk pengujian hipotesis lebih lanjut.

Uji Hipotesis Langsung

Uji t pada tabel 4 digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan dilakukan pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Apabila nilai Prob. $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila Prob. $> 0,05$, maka H_0 tidak ditolak sehingga variabel independen tidak berpengaruh signifikan secara parsial (Gujarati & Porter, 2009; Wooldridge, 2019).

Tabel 4. Hasil Uji t (Pengaruh Langsung)

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Keterangan
X1 → Y	0,148760	0,494642	0,300743	0,7658	Tidak Signifikan
X2 → Y	0,328575	0,250652	1,310881	0,2002	Tidak Signifikan
X3 → Y	3,112240	0,477883	6,512554	0,0000	Signifikan

Sumber : Data diolah peneliti, 2026

Uji Hipotesis Moderasi

Uji hipotesis moderasi pada tabel 5 dilakukan untuk mengetahui apakah Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap kemandirian keuangan daerah. Pengujian dilakukan menggunakan EViews melalui *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan memasukkan variabel interaksi antara masing-masing variabel independen dan TIK. Keputusan hipotesis didasarkan pada nilai probabilitas (*p-value*) dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Jika nilai probabilitas variabel interaksi $< 0,05$, maka TIK terbukti memoderasi hubungan tersebut, sedangkan jika $> 0,05$, maka TIK tidak terbukti sebagai variabel moderasi.

Tabel 5. Hasil Uji t (Pengaruh Tidak Langsung)

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Keterangan
X1 → M → Y	-0,179900	0,264113	-0,680423	0,0141	Signifikan
X2 → M → Y	0,031929	0,049285	0,647842	0,5230	Tidak Signifikan
X3 → M → Y	0,323009	0,083514	3,867711	0,0007	Signifikan

Sumber : Data diolah peneliti, 2026

Pengaruh Efektivitas pendapatan daerah terhadap kemandirian keuangan daerah

Nilai koefisien sebesar 0,148760 menunjukkan bahwa efektivitas pendapatan daerah mempunyai arah hubungan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara ekonomis, peningkatan efektivitas pendapatan daerah cenderung diikuti peningkatan kemandirian keuangan daerah. Namun, pengaruh tersebut sangat lemah dan tidak terbukti secara statistik, karena nilai probabilitas sebesar $0,7658 > 0,05$. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa efektivitas pendapatan daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah tidak dapat diterima. Dengan kata lain, keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan belum secara otomatis meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pemerintahan secara mandiri. Efektivitas lebih menunjukkan keberhasilan mencapai target penerimaan, sedangkan

kemandirian keuangan berkaitan dengan struktur dan kapasitas pendapatan yang benar-benar berasal dari sumber lokal dibandingkan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.

Hasil penelitian ini menarik karena secara teoritis efektivitas pendapatan seharusnya dapat memperkuat kemandirian fiskal. Akan tetapi, tingginya efektivitas penerimaan belum tentu berarti tingginya kemandirian. Hal ini dapat terjadi apabila peningkatan realisasi pendapatan terutama berasal dari sumber pendapatan yang tidak memperbesar basis PAD secara substantif atau apabila pendapatan transfer masih mendominasi struktur pendapatan daerah. Temuan ini dapat dijelaskan menggunakan perspektif Fiscal Decentralization Theory. Desentralisasi fiskal pada dasarnya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan memperoleh pendapatan untuk membiayai pelayanan publik. Namun, keberhasilan desentralisasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan daerah mencapai target penerimaan, tetapi juga oleh kemampuan menghasilkan pendapatan sendiri secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, efektivitas merupakan indikator kinerja pencapaian target, sedangkan kemandirian merupakan indikator ketergantungan struktural terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat memiliki tingkat efektivitas pendapatan yang tinggi tetapi tetap memiliki kemandirian yang rendah apabila transfer pusat masih menjadi sumber utama pendapatan.

Temuan empiris Mareta et al. (2025) menunjukkan bahwa meskipun efektivitas total pendapatan mencapai 97,3% dan efektivitas PAD 99,14%, sekitar 88% pendapatan masih berasal dari transfer sehingga kemandirian daerah tetap rendah. Sejalan dengan itu Hasanah et al. (2025) menunjukkan bahwa kemandirian fiskal merupakan indikator penting bagi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan secara berkelanjutan tanpa ketergantungan berlebihan terhadap transfer pemerintah pusat. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang optimal berperan penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dengan demikian, pencapaian target pendapatan saja belum cukup untuk mencerminkan kemandirian fiskal, karena kemandirian juga bergantung pada kemampuan daerah dalam memperkuat sumber pendapatan sendiri secara berkelanjutan. Dengan demikian, efektivitas pendapatan dan kemandirian fiskal merupakan dua konsep yang berbeda.

Pengaruh Efektivitas penerimaan pajak terhadap kemandirian keuangan daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak daerah memiliki arah pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah dengan koefisien sebesar 0,328575, tetapi pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik dengan nilai probabilitas $0,2002 > 0,05$. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan efektivitas penerimaan pajak belum mampu secara nyata meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Kondisi tersebut dapat dijelaskan karena efektivitas pajak lebih merefleksikan kemampuan pemerintah daerah merealisasikan target penerimaan, sedangkan kemandirian keuangan daerah mencerminkan kemampuan membiayai kebutuhan pemerintahan melalui sumber pendapatan sendiri dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Dengan demikian, tingginya pencapaian target pajak belum tentu meningkatkan kemandirian apabila kontribusi pajak terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui Fiscal Decentralization Theory. Dalam perspektif desentralisasi fiskal, pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah idealnya diikuti dengan kemampuan memperoleh sumber pendapatan yang memadai untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan. Namun, desentralisasi fiskal tidak hanya membutuhkan efektivitas pemungutan, tetapi juga kapasitas fiskal yang memadai. Apabila pemerintah daerah berhasil mencapai target pajak tetapi basis pajaknya kecil, maka peningkatan efektivitas tersebut belum tentu menghasilkan perubahan besar terhadap kemampuan fiskal daerah.

Fenomena tersebut didukung oleh penelitian Temuan ini sejalan dengan Ferdiansyah dan Febrianti (2025) yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal, meskipun rata-rata kemandirian daerah masih rendah (11,08%). Sementara itu, Dharma (2025) menekankan bahwa peningkatan kemandirian fiskal memerlukan optimalisasi pajak melalui perluasan basis pajak, inovasi pemungutan, penagihan tunggakan, dan penguatan kapasitas pengelolaan pajak. Dengan demikian, pencapaian target pajak saja belum cukup tanpa penguatan basis penerimaan secara berkelanjutan.

Pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap kemandirian keuangan daerah

Nilai koefisien sebesar 3,112240 menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal mempunyai arah pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Artinya, peningkatan derajat desentralisasi fiskal akan diikuti oleh peningkatan kemandirian keuangan daerah. Nilai *t-statistic* sebesar 6,512554 menunjukkan bahwa pengaruh tersebut relatif kuat, sedangkan nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$ menunjukkan bahwa pengaruhnya signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah diterima. Secara sederhana, setiap peningkatan 1 satuan derajat desentralisasi fiskal diperkirakan meningkatkan kemandirian keuangan daerah sebesar 3,112240 satuan, dengan asumsi variabel lain dalam model tetap.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar kemampuan daerah menghasilkan dan mengelola sumber pendapatan sendiri, semakin besar pula kemampuan daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Temuan ini secara konseptual sangat sesuai dengan tujuan utama desentralisasi fiskal, yaitu memberikan ruang fiskal kepada pemerintah daerah agar mampu menentukan prioritas pembangunan dan membiayai pelayanan publik berdasarkan kapasitas serta kebutuhan daerahnya. Derajat desentralisasi fiskal pada dasarnya menggambarkan besarnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Oleh karena itu, ketika derajat desentralisasi meningkat, berarti proporsi pendapatan yang bersumber dari PAD semakin besar. Peningkatan proporsi tersebut memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja pemerintahan tanpa sepenuhnya bergantung pada dana transfer.

Temuan ini sangat kuat jika dikaitkan dengan Fiscal Decentralization Theory/Fiscal Federalism. Teori desentralisasi fiskal menekankan bahwa pemerintah daerah seharusnya memperoleh kewenangan dan sumber daya fiskal yang memadai untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam perspektif tersebut, desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan kewenangan administratif, tetapi juga membutuhkan desentralisasi sumber-sumber pendapatan. Apabila kewenangan telah diberikan tetapi sebagian besar sumber pembiayaan tetap berasal dari pemerintah pusat, maka otonomi fiskal menjadi terbatas.

Hasil penelitian juga sejalan dengan Dharmawati, Muhardiana, dan Aprisilia (2024), yang menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah karena memberikan daerah ruang yang lebih besar untuk menentukan prioritas pembangunan dan menggali sumber PAD. Namun, mereka juga menemukan adanya kesenjangan antardaerah: daerah dengan potensi ekonomi dan sumber daya kuat cenderung lebih mandiri, sedangkan daerah dengan kapasitas ekonomi rendah tetap bergantung pada transfer. Penelitian Alvaro (2022) juga menunjukkan bahwa faktor-faktor fiskal memiliki hubungan berbeda dengan derajat desentralisasi dan kemandirian. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa hubungan fiskal antarpemerintah tidak bersifat sederhana karena dipengaruhi oleh struktur transfer, karakteristik ekonomi daerah, dan kemampuan pemerintah daerah mengelola sumber pendapatannya.

Pengaruh efektivitas pendapatan daerah terhadap kemandirian keuangan daerah dimoderasi oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi

Hasil uji menunjukkan bahwa interaksi efektivitas pendapatan daerah $\times$ teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dengan koefisien -0,179900 dan $p\text{-value}$ 0,0141 < 0,05. Artinya, TIK terbukti memoderasi hubungan tersebut dengan memperlemah pengaruh efektivitas pendapatan daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori desentralisasi fiskal, yang menekankan bahwa kemandirian daerah sangat ditentukan oleh kemampuan mengoptimalkan sumber pendapatan sendiri. Peningkatan TIK memang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan pemungutan pajak, tetapi tidak otomatis meningkatkan kemandirian apabila struktur pendapatan daerah masih didominasi dana transfer. Dengan demikian, teknologi lebih berperan sebagai alat pendukung administrasi, bukan sebagai faktor yang secara langsung mengubah kapasitas fiskal daerah. Hasil ini sejalan dengan Priambodo et al. (2024) yang menunjukkan bahwa TIK dapat meningkatkan efisiensi dan penerimaan pajak daerah, serta Masdar et al. (2025) yang menemukan bahwa optimalisasi PAD memperkuat kemandirian keuangan daerah. Namun, Mai et al. (2024) menunjukkan bahwa pengaruh digitalisasi terhadap *fiscal self-sufficiency* tidak selalu positif dan bergantung pada efisiensi teknologi serta kondisi desentralisasi fiskal.

Pengaruh efektivitas penerimaan pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah dimoderasi oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tidak mampu memoderasi pengaruh efektivitas penerimaan pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien interaksi sebesar 0,031929 dengan nilai probabilitas 0,5230, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5 persen. Dengan demikian, peningkatan atau penurunan pemanfaatan TIK tidak terbukti memperkuat maupun memperlemah hubungan antara efektivitas penerimaan pajak daerah dan kemandirian keuangan daerah. Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui Fiscal Federalism Theory, yang menekankan bahwa kemandirian fiskal bergantung pada kemampuan daerah mengoptimalkan sumber pendapatan sendiri. Meskipun TIK dapat meningkatkan efektivitas administrasi pajak melalui digitalisasi pembayaran, pemutakhiran data, dan pengawasan, TIK tidak secara otomatis mengubah struktur penerimaan daerah. Jika peningkatan efektivitas pajak belum meningkatkan kontribusi PAD secara signifikan terhadap total pendapatan, maka TIK belum mampu memoderasi kemandirian keuangan daerah secara signifikan.

Secara empiris, TIK dapat meningkatkan administrasi perpajakan melalui digitalisasi pelayanan, pembayaran, pemutakhiran data, dan pengawasan. Mahi (2022) dan OECD (2021) menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pajak. Tidak signifikannya moderasi TIK dalam penelitian ini dapat dipahami karena TIK lebih berfungsi sebagai instrumen pendukung administrasi daripada sumber penerimaan fiskal. Sejalan dengan Abrori et al. (2024), digitalisasi dapat memperbaiki proses dan kepatuhan perpajakan, tetapi belum tentu secara langsung meningkatkan kemandirian fiskal. Oleh karena itu, TIK perlu didukung oleh perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan kewenangan fiskal, dan peningkatan kontribusi PAD agar dapat memberikan dampak yang lebih kuat terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Dimoderasi Teknologi Informasi dan Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai variabel moderasi. Hal tersebut ditunjukkan oleh koefisien sebesar 0,323009 dengan nilai *t-statistic* 3,867711 dan probabilitas $0,0007 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal, semakin kuat kemandirian keuangan daerah, dan pemanfaatan TIK turut memperkuat hubungan tersebut.

Temuan ini sejalan dengan teori desentralisasi fiskal, yang menjelaskan bahwa pemberian kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah memberikan ruang yang lebih besar untuk mengelola sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Semakin besar kemampuan daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber pendapatan lokal, khususnya PAD, semakin besar pula kapasitas daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan tanpa terlalu bergantung pada transfer pemerintah pusat. Dengan demikian, peningkatan derajat desentralisasi fiskal dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah. Secara empiris, temuan ini mendukung penelitian Pabayo (2025) yang menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan kemandirian fiskal melalui pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk mengelola pendapatan dan belanja. Namun, efektivitas desentralisasi tetap bergantung pada kemampuan daerah mengelola sumber pendapatan dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat. Temuan tersebut juga sejalan dengan Haptari, Ginting, dan Aritonang (2022) yang menempatkan desentralisasi fiskal sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kemandirian keuangan melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pendapatan daerah dan efektivitas penerimaan pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya, derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan proporsi PAD dalam total pendapatan daerah menjadi faktor yang lebih kuat dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Selanjutnya, TIK terbukti memperlemah pengaruh efektivitas pendapatan daerah terhadap kemandirian keuangan daerah, tetapi tidak mampu memoderasi pengaruh efektivitas penerimaan pajak daerah. Sementara itu, TIK memperkuat pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap kemandirian keuangan daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa TIK akan lebih efektif dalam mendukung kemandirian ketika daerah telah memiliki kapasitas dan struktur pendapatan sendiri yang kuat.

Pemerintah daerah perlu memperkuat basis PAD melalui perluasan sumber pendapatan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi potensi ekonomi daerah, serta pengurangan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Pemanfaatan TIK perlu diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga untuk memperluas basis pajak, memperbaiki kualitas data wajib pajak, meningkatkan pengawasan, dan mengoptimalkan penerimaan daerah. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas fiskal dan kualitas pengelolaan pendapatan agar manfaat digitalisasi dapat lebih nyata dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Penelitian selanjutnya dapat memperluas periode pengamatan dan mempertimbangkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kemandirian fiskal, seperti pertumbuhan ekonomi, kapasitas fiskal, ketergantungan transfer, dan kualitas tata kelola.

Penelitian ini memperkuat *Fiscal Decentralization Theory* bahwa kemandirian keuangan daerah lebih ditentukan oleh kemampuan memperkuat sumber pendapatan sendiri, khususnya PAD, daripada sekadar pencapaian target pendapatan. TIK berperan sebagai instrumen pendukung yang

efektivitasnya bergantung pada kapasitas fiskal daerah. Pemerintah daerah perlu memperkuat basis PAD dan pajak melalui optimalisasi potensi daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pemanfaatan TIK untuk digitalisasi pembayaran, integrasi data, dan pengawasan penerimaan. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga mendukung penguatan kemandirian fiskal. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada periode pengamatan, cakupan variabel, dan penggunaan indikator TIK yang masih bersifat agregat. Penelitian selanjutnya disarankan memperpanjang periode pengamatan dan menggunakan data panel agar dinamika antarwilayah dan antarwaktu dapat dianalisis lebih baik. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel seperti pertumbuhan ekonomi, kapasitas fiskal, dan ketergantungan transfer serta menggunakan indikator TIK yang lebih spesifik dalam pengelolaan pendapatan daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, A., Purwohedi, U., & Yusuf, M. (2024). Digital transformation in the local tax system: Does it strengthen key factors of tax compliance? *Jurnal Bina Praja*, 16, 687–701.
- Alazhari, M. A., & Hendaris, R. B. (2025). Tax effort, flypaper dynamics, and fiscal stress: An empirical study of regional financial independence. *E-Journal of Accounting*, 35(5), 1746–1760. <https://doi.org/10.24843/EJA.2025.v35.i05.p18>
- Alvaro, R. (2022). Analysis of the determinants of the degree of fiscal decentralization and regional financial independence in Indonesia. *Journal of Budget: Issues and Problems of State Finance*, 5(1), 130–152. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v5i1.59>
- Biyantoro, A. (2023). Local Government Financial Reports: Utilisation of Information Technology and Implementation of Government Accounting Standards. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 15(2).
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30.
- Diaha et al. (2026). Information technology capability and financial reporting quality in local governments: The mediating role of accounting information system quality. *Cogent Business & Management*.
- Dharma, A. B. (2025). Policy strategy for optimizing local tax revenue to support fiscal independence in Lampung Province. *Development Innovation: Research and Development Journal*, 13(2). <https://doi.org/10.35450/jip.v13i02.1218>
- Dharmawati, T., Muhardiana, W. O., & Aprisilia, W. O. Z. A. (2024). The role of fiscal decentralization in enhancing regional financial independence in Indonesia. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(12), 241–252. <https://doi.org/10.62504/jimr1107>
- Diaha, A. M., Hasiara, L. O., Lesmana, D., Raharjo, S., Apriantje, Y., & Yudaruddin, R. (2026). Information technology capability and financial reporting quality in local government: The mediating role of accounting information system quality. *Cogent Business & Management*, 13(1), 2654816. <https://doi.org/10.1080/23311975.2026.2654816>
- Fariyanda, R., Umyana, A., & Muhsin, M. (2025). Measuring regional fiscal independence: The influence of regional original income and revenue sharing funds in the era of decentralization in West Kalimantan Province. *JEMSI (Journal of Economics, Management, and Accounting)*, 11(5), 4743–4754. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i5.4320>
- Ferdiansyah, A. B., & Febrianti, G. R. (2025). Determination of regional fiscal independence: The role of regional taxes and central government transfers in East Kalimantan Province. *Journal of Treasury Management*, 6(2), 126–145. <https://doi.org/10.33105/jmp.v6i2.582>

- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Public sector accounting: Regional financial accounting* (4th ed.). Salemba Empat.
- Haptari, V. D., Ginting, A. M., & Aritonang, F. D. (2022). Analysis of factors affecting regional financial independence in the framework of a policy strategy for increasing regional original income. *Eduvest—Journal of Universal Studies*, 2(4), 777–796. <https://doi.org/10.36418/edv.v2i4.412>
- Hasanah, N., Masdar, R., Furqan, A. C., & Tenripada. (2025). Empirical evidence on the role of local own-source revenue in strengthening fiscal independence of Indonesian local governments. *Owner: Accounting Research and Journal*, 9(4), 2950–2963. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i4.2788>
- Mahi, B. R. (2022). Analysis of the correlation between ICT and tax revenue in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 18(2), 169–183.
- Mahmudi. (2019). *Analysis of regional government financial reports* (4th ed.). UPP STIM YKPN.
- Mai, W., Li, C., Chen, Y., & Mai, L. (2024). Exploring the influence of digital infrastructure on fiscal self-sufficiency: Empirical evidence from 29 provinces in China. *SAGE Open*. <https://doi.org/10.1177/21582440241284108>
- Mareta, A. Y., Frinaldi, A., Asnil, & Putri, N. E. (2025). Analysis of the realization of regional revenue in Tanah Datar Regency in 2024: Fiscal performance, effectiveness of PAD management, and challenges to regional financial independence. *SENTRI: Scientific Research Journal*, 4(11), 3113–3120. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i11.4975>
- OECD. (2021). *Supporting the digitalisation of developing country tax administrations*. OECD Publishing.
- ornatzky, L. G., & Fleischer, M. (1990). *The Processes of Technological Innovation*. Lexington Books.
- Pabayo, A. S. T. (2025). Impact of fiscal decentralization policy on regional fiscal independence in Indonesia. *Journal of Local Government Issues*, 8(1), 142–160. <https://doi.org/10.22219/logos.v8i1.37646>
- Priambodo, A., Anwar, N., & Suharno. (2024). Is GRDP a mediating factor in enhancing local tax revenues due to ICT development in Indonesia? *Nurture*, 18(3). <https://doi.org/10.55951/nurture.v18i3.722>
- Riza, R., & Zuripal. (2023). Pengaruh tingkat ketergantungan daerah, efektifitas PAD dan *tax effort* terhadap kemandirian daerah pada Pemerintah Kota Bukittinggi. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 9(5), 1961–1973. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1508>
- Siswanto, S., & Maylani, D. A. (2022). Financial statement analysis to assess local government financial performance. *Nominal: Barometer of Accounting and Management Research*, 11(1), 184–195. <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i1.48423>
- Sugiyono. (2019). *Quantitative, qualitative, and R&D research methods*. Alfabeta.
- Syafri, R. A., Sofilda, E., & Suparyati, A. (2024). Determinants of financial independence of district/city governments in Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Journal of Treasury, State Finance and Public Policy*, 9(4), 277–290. <https://doi.org/10.33105/itrev.v9i4.858>
- Wooldridge, J. M. (2019). *Introductory econometrics: A modern approach* (7th ed.). Cengage Learning